

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 KRUI KABUPATEN PESISIR
BARAT LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Memproleh Gelar Sajana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Oleh :
APRIYANTI
NPM. 1811030317

Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444H/2021**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 KRUI KABUPATEN PESISIR
BARAT LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syatar
Syarat Guna Memproleh Gelar Sajana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Oleh :
APRIYANTI
NPM. 1811030317

Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam

Pembimbing I : Dr. Oki Darmawan, M.Pd
Pembimbing II: Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M. Ag

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443H/2021**

ABSTRAK

MAN 1 Krui kabupaten pesisir barat lampung mempunyai keunggulan yang sangat menarik karena madrasah ini bukan hanya berkualitas saja tetapi yang sangat berkesan sekolah ini tidak ada yang dinamakan pembayaran SPP/uang sekolah lainnya dan dibuktikan dengan akreditasi A,dan masyarakat di pesisir barat banyak yang menyekolahkan anaknya di MAN 1 ini karena sekolah tersebut sudah mempunyai kelulusan yang baik dan diterima di universitas yang bergengsi, MAN 1 Krui kabupaten pesisir barat lampung ini bukan hanya mampu mengadopsi pembelajaran umum saja tetapi pembelajaran yang bernilai islam, dan peneliti yakin akan peran serta komite madrasahny berjalan dengan baik.

Penelitian ini adalah diskripsi kualitatif teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, dan penarikan kesimpulan sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan ketekunan dan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: komite madrasah memberikan pertimbangan kepada MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung tentang kebijakan dan program baru di sekolah dengan hasil tidak memberatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Dalam hal merencanakan anggaran dan pendapatan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS) komite madrasah memberikan pertimbangan yaitu di MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung sama sekali tidak di pungut biaya dari lima tahun sebelumnya. Upaya kriteria kinerja sekolah, komite madrasah memberikan pertimbangan di MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung tidak memberatkan peserta didik dan tenaga pendidikan. Dalam kriteria fasilitas pendidikan di sekolah komite madrasah memberikan saran yaitu memilih fasilitas harus yang berkualitas dan banyak manfaatnya. Menyangkut kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain komite madrasah memberikan pertimbangan yaitu mulai dari komite sekolah, masyarakat, orang tua/ wali sangat baik dan saling peduli. Komite sekolah mempunyai peran Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Tetapi khusus

di MAN 1 kroi Pesisir barat ini tidak ada yang dimanakan SPP atau uang sekolah lainnya melainkan dana yang digunakan untuk keperluan sekolah seluruhnya memakai dana bos. Mengawasi layanan pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan perundang undangan ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan kepala sekolah.

Kata Kunci: Peran Komite, Mutu Pendidikan



ABSTRACT

MAN 1 Krui, the west coast of Lampung, has a very interesting advantage because this madrasa is not only of high quality, but what is very impressive is that there is no such thing as payment of tuition fees/other tuition fees and is proven by accreditation A, and many people on the west coast send their children to school. at MAN 1 because the school already has a good graduation and was accepted at a prestigious university, MAN 1 Krui, the west coast of Lampung, is not only able to adopt general learning but learning that has Islamic values, and researchers believe that the role of the madrasa committee will run smoothly.

This research was a qualitative description of data collection techniques by means of interviews, documentation. The data obtained were analyzed by data reduction steps, and drawing conclusions, while the data validity test was carried out with persistence and observation and triangulation. The triangulation used in this study is source triangulation.

From the results of the research and discussion, the following conclusions were drawn: the madrasa committee gave consideration to MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung about new policies and programs in schools with the results not burdening educators and students. In terms of planning budgets and school expenditure income/work plans and school budgets (RAPBS/RKAS) the madrasa committee gave consideration, namely that at MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung, no fees were charged at all from the previous five years. Efforts on school performance criteria, the madrasa committee gave consideration at MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung not to burden students and education staff. In the criteria for educational facilities in schools, the madrasa committee provides advice, namely choosing facilities that have quality and many benefits. Regarding the criteria for school cooperation with other parties, the madrasa committee provides considerations, namely starting from the school committee, the community, parents / guardians are very good and care about each other. The school committee has a role in raising funds and other educational resources from the community, both individuals/organizations/business/industry and other stakeholders through creative and innovative efforts. However, specifically at MAN 1 Krui Pesisir Barat, no tuition fees or other school fees are allocated, other than the funds used for school purposes entirely using the boss's funds. Supervising education services in schools in

accordance with these laws and regulations is also intended to make school committees as school partners and principals.

Keywords: (committee role, education quality)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Apriyanti
Npm : 1811030317
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Peran Komite Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Kruai Kabupaten Pesisir Barat Lampung”

Skripsi ini adalah sepenuhnya karya penelitian saya sendiri, Skripsi ini benar-benar hasil karya penelitian yang dilakukan di MAN 1 Kruai Kabupaten Pesisir Barat Lampung bukan duplikat atau plagiat kecuali pada bagian-bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya atau penelitian ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 11 Juni 2022



Apriyanti
1811030317



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Nama : APRIYANTI

NPM : 1811030317

Jurusan : Manajemen pendidikan islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Oki Dermawan, M.Pd
NIP.1976103002005011001

Pembimbing II

Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag
NIP.196704201998031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Hj. Yetri, M.Pd
NIP. 196512151994032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin 1 Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT, LAMPUNG 2021/2022** yang disusun oleh: **APRIYANTI, NPM. 1811030317**, Program Studi **Manajemen Pendidikan Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada hari Jum'at, Tanggal **14 Oktober 2022**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Hj. Yetri, M.Pd

Sekretaris : Prima Aji Putra, M.Pd

Penguji Utama : Dr. Riyuzen Praja Tuala, M.Pd

Penguji Pendamping I : Dr. Oki Dermawan, M.Pd

Penguji Pendamping II : Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



Prof. Dr. Hj. Nurjana, M.Pd

NIP. 19640828198032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. AN-Nahl ; 90)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 90

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang tak henti-henti selalu terucapkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bak Muhammad Rasyid dan Mak Anis Wati yang saya sayangi dan yang saya kagumi. Dan senantiasa menyayangiku, mengajarku, mendo'akanku tanpa ada rasa lelah, letih dan bosan. Dan selalu mensupport saya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan S.1 ini.
2. Untuk suadaraku, baik Udo Marwin Purnama dan wo Sari, wo Novi Fitriani (Alm) dan dongah Fuji, ngah Dina Setia dan Abang Nasiruddin, wo pidia serta keponakan-keponakan ku Kirana Fatwa Ayunda, Nadin Mutiara, Febriana Naufalia Rabbani, dan Muhammad Abu Adnan. terimakasih sudah menjadi semangatku dalam menyelesaikan pendidikan ini dan selalu menanyakan kapan wisuda.
3. Untuk teman teman seperjuanganku: Evita Sari, Novalia Sagita, Robi'atin Adawiyah, Desi Gustia Sari, Neti Wahyuni, Ihsan Jaya terimakasih sudah memberikan suportnya yang tiada henti.

RIWAYAT HIDUP

Apriyanti dilahirkan di Pekon Tanjung Jati, kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat) Pada tanggal 17 April 2000. Anak ke-4 dari 4 (Empat) bersaudara, Pasangan Bapak Muhammad Rasyid dan Ibu Anis Wati. Pendidikan saya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Pelita Jaya, pekan Pelita Jaya kecamatan pesisir selatan Kabupaten pesisir barat selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Tanjung Jati, Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Pesisir Barat Lulus Pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 pekan Biha, keamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat mengambil Jurusan IPS dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 meneruskan pendidikan S.1 ke Perguruan Tinggi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hingga sekarang. Pada Bulan juni sampai Juli 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) didesa Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Kemudian pada Bulan September sampai Oktober penulis Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) SMP El-Syihab Sukabumi Bandar Lampung Penulis juga Pernah Aktif dalam organisasi dan Pernah mengikuti Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengurus ROHIS SMA 1 Krui tahun 2016-2017
2. Aktif HIQMA uin RIL 2018-2019

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Hj. Yetri, M.Pd. selaku ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
3. Bapak Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Oki Dermawan, M.Pd selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
5. Karyawan dan karyawan yang telah membantu dalam pengadministrasian sehingga proses berjalan lancar.
6. Kepala sekolah, Komite, Guru dan Staf TU serta siswa-siswi MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kebaikan penulis dalam belajar. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. amin ya rabbal alamin.

Bandar Lampung, 07 Maret 2022

Apriyanti

1811030317



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Terdahulu Yang Relavan	15
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	29
B. Komite Madrasah	33
1. Pengertian Komite Madrasah	33
2. Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah	36
3. Tujuan Komite Madrasah.....	36
4. Peran dan Fungsi Komite Madrasah	37
5. Organisasi Madrasah	39
C. Mutu Pendidikan	44
1. Pengertian Mutu Pendidikan	44
2. Ciri-ciri Mutu Pendidikan	49
3. Indikator Mutu Pendidikan.....	49

BAB III DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	53
1. Sejarah MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung.....	53
2. Visi-Misi MAN 1 Pesisir Barat Lampung.....	57

3. Tujuan MAN 1 Pesisir Barat Lampung.....	58
4. Tugas dan Fungsi MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung	58
5. Struktur Organisasi MAN 1 Krui Pesisir Barat Lampung	58
6. Data Kepala Sekolah MAN 1 Pesisir Barat Lampung	59
7. Data Pendidik MAN 1 Pesisir Barat Lampung	60
B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data dan Penelitian.....	81
B. Temuan Penelitian	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar lebih mudah memahami judul proposal ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan dengan jelas dan terperinci terkait dengan tujuan proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak ada kesalah pahaman dengan pemaknaan judul dari beberapa istilah yang ada. Proposal ini berjudul : **“Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**.

1. Komite Madrasah

Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisien pengelolaan pendidikan disuatu pendidikan baik pada jalur pendidikan pra madrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.¹

2. Mutu Pendidikan

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis, dalam dunia bisnis, dalam dunia bisnis, baik yang bersifar produksi maupun jasa. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang bidang lainnya, seperti pemerintah, layanan sosial, pendidikan, bahkan dalam bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.²

3. MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat

MAN 1 Krui Kabupeten Pesisir Barat adalah lembaga pendidikan formal tinggal menengah atas yang berada dibawah naungan departemen pendidikan agama. Terletak di JL.

¹ Misbah, *Pera Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meingkatkan Mutu Pendidikan* (bandug: alfabeta, 2009), 8.

² nana syaodin Sukmadiata, *Pegendalian Mutu Sekolah Menengah Konsep, Prinsip, Dan Intrumen* (bandung: refika aditama, 2006), 8.

Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa
Kecamatan pesisir Tengah Krui Pesisir Barat- Lampung 34874

B. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa di rasakan dengan cara melihat sebuah lembaga pendidikannya dalam menjalankan lembaga pendidikannya dengan cara yang bagus dan efektif maka mutu pendidikan akan ternilai bagus pula. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang dilenggarakan atau dijalankan dengan sekedarnya maka mutu pendidikannya akan terlihat biasa biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan pendidikan atas berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melali berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, tugas guru dalam proses pendidikan, yaitu menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik. Oleh karena itu guru disamping sebagai pengajar atau penyampaian materi pelajaran guru juga berperan sebagai pelatih, pembimbing, dan belajar.³

Tersedianya buku dan alat alat pendukung pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu madrasah. Namun berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai madrasah terutama di kota-kota peningkatan mutu cukup mengembirakan namun sebagian besar lainnya sangat memperhatikan.

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi suatu kebiasaan. Perubahan sikap atau

³ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia, Dalam Dunia Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofi* (Yogyakarta: Suku – Press, 2014), 11.

tingkah laku menjadi perhatian.⁴ Salah satu faktor utama penentuan masa depan bangsa adalah pendidikan. Dimana tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 bertujuan Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional antara lain sebagai berikut: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.

Keenam masalah tersebut adalah bukti menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya dalam sebuah lembaga pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Oleh karena itu, konsep pendidikan dalam ajaran Islam dijelaskan dalam Al-qur'an:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٩

Artinya: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. (Al Baqarah 59).⁵

⁴ chairul anwar, *Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kompetorer* (Yogyakarta: ircisod, 2017), 111.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 59

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al Imran 110).⁶

Dari ayat diatas Al-qur'an mengajarkan anak didik agar bisa mengabdikan kepada Allah SWT. Seluruh potensi anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan rohani harus dibina dengan baik, keserasian dan keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya, dan mengajarkan peserta didik agar berbakti kepada orang tua, mengajarkan apa yang sebaiknya di kerjakan, dan menjauhi larangannya serta kesederhanaan dalam berkomunikasi dengan sesama.

Para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam berperilaku interaksi dengan peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.

Segala upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan ilmu akan terus berproses seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan. Konsep dan ilmu tersebut baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Mereliasisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 110

manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama.⁷

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada madrasah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di madrasah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan sebagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di madrasah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada madrasah untuk menentukan kebijakan madrasah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah.⁸ Dalam melaksanakan manajemen berbasis madrasah peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite madrasah.

Keberadaan komite madrasah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite

⁷ sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: pustaka widiyamata, 2006), 3.

⁸ E. mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi* (bandung: pt remaja karya, 2006).

madrasah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.⁹

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 tentang Acuan Pembentukan Komite Madrasah, dinyatakan bahwa keberadaan komite madrasah berperan sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif
3. Mengawasi pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kerja sekolah.¹⁰

Berdasarkan keputusan Mendikbud tersebut, komite madrasah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah, maupun jalur pendidikan luar madrasah. Untuk penanaman badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.¹¹

⁹ hamzah B.uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: pt bumi aksara, 2007), 92.

¹⁰ kepmendiknas sk no.75/u/2016, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* (Jakarta: sinar grafika, 2016), 4.

¹¹ hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2006), 89.

Adapun tujuan komite madrasah yaitu 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu disatuan pendidikan.¹²

Dari urain diatas dapat kita ketahui bahwa dewan pendidikan dikomite madrasah dipandang sangat stretegis sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan beberapa kalangan masyarakat serta pengemat pendidikan yang diikut sertakan dan memberi masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya sangat mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite madrasah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, madrasah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga madrasah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.¹³ Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi madrasah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite madrasah di setiap satuan pendidikan.

MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di pesisir barat. Yang menyikapi sangat serius dalam permasalahan lembaga pendidikan yang menjangkrik saat ini yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan. MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat dalam menyikapi permasalahan tersebut tidak lah bekerja sendiri melainkan

¹² *Ibid*, 90

¹³ hamzah B.uno, *Profesi Kependidikan*, 93.

mengikuti serta komite madrasah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga (MAN 1 KRUI kabupaten Pesisir Barat) menyadari bahwa berfikir, membuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama.¹⁴

“Mekanisme pembentukan komite madrasah di MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat ini terlebih dahulu kita mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan.” (Wawancara dengan Bapak Kadarusman selaku ketua komite madrasah MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat)

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 7 April 2021 bertempat di MAN 1 Pesisir Barat dengan narasumber:

1. Toipi, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Madrasah MAN 1 Pesisir Barat
2. Drs. Kadarusman, M. Pd. I selaku kepala komite MAN 1 Pesisir Barat

Adapun hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 7 April 2021 bertempat di MAN 1 Pesisir Barat dengan kepala MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat bapak Toipi tentang peran komite sebagai pemberi pertimbangan menyatakan:

“Komite madrasah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal pengadaan peralatan laboratorium, buku-buku, dan rencana pembangunan laboratorium bahasa, sebelum madrasah mengambil keputusan, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite madrasah. Maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite madrasah kepada pihak madrasah.” (Wawancara dengan Bapak Toipi, selaku kepala MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat)

¹⁴ Toipi, Wawancara dengan Kepala MAN 1 KRUI, Kabupaten Pesisir Barat. 27 Februari 2021

Adapun hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 7 April 2021 bertempat di MAN 1 Krui Pesisir Barat dengan ketua komite MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat bapak Kadarusman tentang peran komite sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri/maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif menyatakan :

“Komite madrasah perannya menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif misalnya hasil pengalangan dana dapat digunakan seperti menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, membiayai program atau kegiatan peningkatan mutu sekolah, pengembangan sarana-prasarana, biaya kegiatan oprasional komite dilakukan secara wajar dan harus di pertanggung jawabkan secara transparan, misalnya dalam memperingati hari besar komite madrasah selalu ikut andil dalam acara yang diadakan di Madrasah, dengan mengadakan lomba-lomba, misalnya cerdas cermat, pidato, puisi, peragaan busana, qiro’ah, dll. Tidak hanya itu, komite madrasah juga membantu pengadaan alat-alat ibadah dari penggalangan dana tersebut seperti: mukenah dan sarung yang ada di mushalla, misalkan pada hari-hari biasa siswa-siswi banyak yang tidak membawa mukenah dan sarung tapi sekarang di mushalla sudah ada dan itu hasil dari kerjasama dengan komite madrasah melalui iuran rutin atau penggalangan dana“.(Wawancara dengan Bapak Kadarusman selaku ketua komite madrasah di MAN 1 KRUI Pesisir Barat)

Adapun hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 7 April 2021 bertempat di MAN 1 Pesisir Barat dengan bapak Kadarusman dan kepala MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir barat tentang peran komite sebagai pengawas pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan :

“Peran komite madrasah di MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat ini dalam hal pengawas pelayanan pendidikan disekolah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Yaitu dalam hal mengawas jalannya proses belajar-mengajar.” (Wawancara dengan Bapak Toipi, selaku kepala MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat).

Hal sedana di ungkapkan pula oleh ketua komite MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir barat bapak Kadrusman menyatakan :

“Komite madrasah perannya dalam pengawas pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di madrasah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program madrasah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas madrasah, misalnya: penambahan buku-buku yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.” (Wawancara dengan Bapak Kadarusman, selaku ketua komite madrasah MAN 1 KRUI kabupaten Pesisir Barat).

Adapun hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 7 April 2021 bertempat di MAN 1 Pesisir Barat dengan ketua komite MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat bapak kadarusman dan kepala MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir barat tentang peran komite sebagai penindaklajuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat srta hasil pengamatan komite masdrasah atas kinerja masdrasah menyatakan :

“Selain dalam hal pengembangan fisik, komite madrasah menindaklajuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat seperti hasil pengamatan komite masdrasah atas kinerja masdrasah mengasramakan peserta didik yang nakal-nakal pada waktu liburan, agar anak-anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dan berakhlak, ini tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tua.” (Wawancara dengan Bapak Kadarusman selaku ketua komite madrasah MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat).¹⁵

¹⁵ Toipi, S.Ag., M.Pd Drs. Kadarusman, M. Pd.I, Kepala Sekolah dan ketua Komite, wawancara pada tanggal 27 Februari 2021

Selain itu juga pihak madrasah berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pihak MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat berusaha seoptimal mungkin, memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan komite madrasah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik membahas masalah dengan judul “Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Study kasus MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat”.

No	Peran Komite Madrasah	Hasil Wawancara
1	Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan	<p>a. Kebijakan dan program sekolah sudah berjalan dengan baik karena peran komite sangat mempengaruhi dan komite madrasah selalu meberikan pertimbangan bahwasanya dalam menentukan kebijakan dan program sekolah jangan memberatkan penddikan dan peserta didik.</p> <p>b. Rencana anggaran dan pendapatan belanja, di Man 1 ini tidak ada yang dinamakan pembayaran SPP atau uang</p>

		<p>sekolah lainnya, semuanya atas komite madrasah selalu memberikan pertimbangan/masukan kepada pihak madrasah</p> <p>c. Kriteria kinerja sekolah, komite madrasah sellau memebrikan pertimbangan kepada Man 1 bahwasanya saat pembuatan RPP/SILABUS jangan memberatkan peserta didik dan tenaga pendidik</p> <p>d. Kriteria fasilitas pendidikan, komite Man 1 memberikan saran kepada pihak madrasah bhawasanya jika menentukan fasilitas untuk madrasah harus yang baik dan banyak manfaatnya.</p>
2	Menggalan dana dana sumberdaya pendidikan dari masyarakat	Di Man 1 ini tidak ada yang dinamakan pembayaran SPP atau uang sekolah lainnya.
3	Mengawasi layanan pendidikan	Komite di MAN 1 ini selalu mengawasi madrasah setiap sebulan sekali untuk melihat perkembangan program pendidikan dll di MAN 1 Krui pesisir barat lampung.
	Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan	Komite menyarankan kepada pihak madrasah agar menerima atau menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali,

	masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah	dan masyarakat agar semua masalah bisa terselesaikan dengan baik.
--	---	---

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah peran komite madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 KRUI Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Adapun subfokus pada penelitian ini adalah tugas-tugas komite madrasah:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (rapbs/rkas), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komite madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung ?

2. Bagaimana komite madrasah menggalang dana dan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung ?
3. Bagaimana komite madrasah sebagai pengawas layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung ?
4. Bagaimana komite madrasah MenindakLanjuti Keluhan, Saran, Kritik Dan Aspirasi Dari Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan Masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana komite madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana komite madrasah menggalang dana dan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana komite madrasah sebagai pengawas layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
4. Untuk mengetahui Bagaimana komite madrasah MenindakLanjuti Keluhan, Saran, Kritik Dan Aspirasi Dari Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan Masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi ilmu pengetahuan pendidikan, khususnya manajmen pendidikan

islam mengenai peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Dasar atau acuan yang berupa temuan temuan atau teori melalui berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung.

Penelitian yang telah ada sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaini, A. Syarifudin, Vol. 1 No. 2 april 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan pertimbangan (advisory agency), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah. Mendukung (supporting agency) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Melakukan Kontrol (controlling agency) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dilihat dari peraturan menteri pendidikan

dan kebudayaan bahwa penelitian ini masih menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2002, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Persamaan dari penelitian saya yaitu sama sama memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁶

2. Mas'ud, Vol. 1 No. 2, April 2020, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode metode survey, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi (responden) melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah berada pada kondisi baik, terutama pada aspek memberi pertimbangan tentang penetapan RAPBS, dengan nilai persentase tertinggi sebesar 87,01%. Namun masih terdapat kelemahan pada peran sebagai mediator yang memperoleh nilai persentase terkecil, hanya 67,01% yang merupakan temuan empiris pada penelitian ini. Hal ini dapat menjelaskan bahwa fenomena yang menunjukkan bahwa komite sekolah belum berpetan maksimal, bukan secara keseluruhannya melainkan hanya pada aspek peran sebagai mediator saja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dilihat dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa penelitian ini masih menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2002, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Dan juga saya pemerliti di madrasah aliyah sedangkan penelitian ini meneliti di madrasah ibtidaiyah. Persamaan dari penelitian saya yaitu sama sama memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif¹⁷
3. Rambli, Vol. 3 No. 1 april 2021, Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara

¹⁶ A. Syarifudin muhammad isnaini, "Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 1 Palembang," *Jurnal Pai Raden Fattah 1*, no.2 (2019).

¹⁷ mas'ud, "Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah," *Madinasika Manajemen Dan Keguruan 1*, no. 2 (2020): 23.

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Komite Madrasah, pihak madrasah tidak serta merta memilih dengan suka hati siapa yang menjadi ketua komite serta pengurusnya, tetapi melalui mekanisme dan proses dengan melakukan rapat dan pertimbangan dari semua pihak dalam memutuskan keputusan dalam pembentukan Komite Madrasah. Dari hasil rapat dapat ditentukan siapa ketua dan pengurus dari Komite Madrasah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dilihat dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa penelitian ini masih menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2002, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Persamaan dari penelitian saya yaitu sama-sama memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁸

4. I Gusti Made Adi Suarnyana, Agus Sutanto, M. Ihsan Dacholfany, Vol. 5. No. 1, Juni 2020, Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Sesuai dengan fokus penelitian, paparan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Analisis peranan komite dalam meningkatkan mutu layanan yang meliputi empat hal yaitu: (1) peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency), (2) peran komite sekolah sebagai pendukung (supporting agency), (3) peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (controlling agency), (4) peran komite sekolah sebagai badan penghubung (mediator agency). 2) analisis faktor pendukung dan penghambat komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMA; dan 3) mendeskripsikan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dilihat dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa penelitian ini masih

¹⁸ rambi, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Tadabbur Peradaban Islam* 3, no 1 (2021): 12.

menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2002, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Persamaan dari penelitian saya yaitu sama sama memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁹

5. Lathifah, Vol 3, No 3, November 2017, Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah adanya peran Komite Sekolah dalam bidang manajemen hubungan masyarakat, khususnya yang terkait dengan peran komite sekolah sebagai mediator menjadikan komunikasi antara sekolah dan lembaga-lembaga terkait dapat terjalin dengan harmonis. Orangtua siswa juga mendapatkan informasi tentang seluruh program sekolah. Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat secara beriringan saling bantu membantu agar pembelajaran siswa dapat berkualitas dan berdampak pada meningkatnya prestasi siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dilihat dari judul nya yaitu peran komite sekolah dalam proses manajemen madrasah sedangkan penelitian saya yaitu peran komite madrasah dalam meningkakan mutu pendidikan. dan di lihat dari dilihat dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa penelitian ini masih menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2002, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Persamaan dari penelitian saya yaitu sama sama memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif.²⁰

¹⁹ M. ihsan dacholfany i gusti mad adi suarnyana, agus sutanto, “Analisis Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Surabaya Lampung Tengah,” *Lentera Pendidikan* 3, no. 1 (2017): 123.

²⁰ lathifah, “Peran Komite Sekolah Dalam Proses Manajemen Madrasah Tsanawiyah Negeri,” *Ilmu Ekonomi Bisnis* 3, no 3 (2017): 43.

H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang akan di laksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang di diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Metode pengertiannya adalah cara yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang memiliki standar, sistematis, dan logis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian, metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai yang di ungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang di kumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.²¹

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian sesuai dengan judul skripsinya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.²²

Dilihat dari jenisnya, maka dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan desain study kasus.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat yang berlokasi di JL. Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan pesisir

²¹ lex y j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: pt remaja rosdakarya, 2007), 11.

²² sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2002), 18.

Tengah Krui Pesisir Barat- Lampung34874. Pemelilihan lokasi ini atas pertimbangan, sebagai berikut :

- a. Lokasi yang mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian
 - b. Lokasi penelitian tersebut, secara historitis tertarik dalam mengetahui pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh sekolah tersebut selama prose pembentukan variable judul yang telah penulis angkat.
- c. Sumber Data

Yang menejadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini peneliti membaginya dalam 2 katagori, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti data hasil wawancara.²³ Dalam penelitian ini metode pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung terhadap pihak MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder seperti: (1) buku-buku yang relavan dengan judul penelitian, (2) dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi objektif di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat yang memiiki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dekumentasi dengan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi.

Menurut Suharsimi Arikunto mengklarifikasi Sumber Data Yaitu :

²³ husein sujarweni, *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran* (Jakarta: pt raja grafindo persada, 1997), 43.

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberi jawaban lisan melalui wawancara tertulis berupa angket.²⁴ Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi kepala madrasah, ketua komite, dan guru di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan data tentang peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. *Paper*, sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, sisbol-simbol lain. Sumber data ini berupa dokumen, arsip masalah tentang peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk atau mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan (diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam proposal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis yang disusun. Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik agar informan mau bekerja.

Wawancara terstruktur digunakan peneliti dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Hal

²⁴ suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: pt rineka cipta, 2002), 107.

ini bertujuan agar percakapan dalam wawancara lebih terarah dan terarah pada tujuan yang dimaksudkan dan untuk menghindari percakapan yang terlalu luas, serta menjadi tolak ukur umum dan dapat dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat wawancara.

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat.²⁵ Adapun sasaran informannya yaitu:

1. Komite Madrasah
 2. Kepala Madrasah
 3. Guru
- b. Observasi (pengamatan) yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu "suatu proses pengamatan yang dilakukan observasi dengan tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian dan kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi dilakukan oleh peneliti itu sendiri."²⁶ Observasi dilakukan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan sebuah gambaran langsung tentang bagaimana peran komite dalam mutu pendidikan.
- Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data dan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi objektif di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Dokumentasi adalah Pengumpulan data melalui dokumentasi penulis menggunakan bentuk berupa foto atau gambar, surat-menyurat dan dokuem-

²⁵ *Ibid.*203

²⁶ wiratna sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: pt pustaka baru, 2014), 32.

dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi berupa gambar, symbol, laporan, peraturan, surat-surat, foto, sketsa, artefak, dan catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen juga tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan bisa dijadikan sumber penguat data observasi dan wawancara.²⁷

e. Intrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data, sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut sugiyono “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.²⁸

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data seperti: handphone, perekam suara dan kamera, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.²⁹ Dan setelah masalah tersebut dipelajari dengan jelas maka peneliti mengembangkan instrument penelitian melalui pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola kategori dan

²⁷ rully indrawan, *Metodelogi Penelitian* (bandung: pt rafika aditama, 2017), 139.

²⁸ sugiono, *Prosedur Penelitian* (bandung: alfabeta, 2006), 222.

²⁹ arifn imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Keagamaan* (malang: rineka cipta, 1999), 353.

satuan urutan data. Menurut arifin imron, mengatakan “analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan secara keseluruhan kepada orang lain”.³⁰

Selanjutnya teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan atau menggambarkan keadaan objek penelitian³¹. Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh miles dan huberman, yaitu: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dan berdiri sendiri dari proses analisis data, akan tetapi merupakan bagian proses itu sendiri.

2. Display data

Display data merupakan suatu proses pengorganisasian (pengelompokan) data, sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram atau grafik. Dengan hal tersebut diharapkan peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data yang begitu banyak.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis, langkah ini

³⁰ Arifin imron, penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan (malang: kalimasahada, 1999), h. 84.

³¹ Suharsimin Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 353.

dimulai dengan memaparkan pola, judul, hubungan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang mengarah pada peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

g. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.³² Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

h. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan ini terbagi atas lima bab yang saling terikat satu sama lain, berikut adalah uraiannya.

BAB I, Pada bab ini mengemukakan tentang Penegasan judul, Latar belakang masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian terdahulu yang relevan, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

³² sugiono, *Prosedur Penelitian*, 330.

BAB II, Memuat uraian tentang teori-teori yang mendukung judul penelitian yang dirujuk dari buku-buku dan pustaka penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dalam penelitian ini tentang Manajemen Strategi meliputi : peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengertian komite madrasah, kedudukan dan sifat komite madrasah, tujuan komite madrasah, peran dan fungsi komite madrasah, organisasi madrasah, pengertian mutu pendidikan, ciri-ciri mutu pendidikan, indikator mutu pendidikan,

BAB III, Mendeskripsikan objek penelitian yang memuat tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. Gambaran umum objek penelitian ini meliputi sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi madrasah, tujuan madrasah, tujuan dan fungsi, tujuan khusus, struktur organisasi, data kepala sekolah, penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV, membahas tentang peran komite madrasah dalam Meningkatkan mutu pendidikan di MAN I Krui Kabupaten Pesisir Barat meliputi: sebagai pemberi pertimbangan yaitu (kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah/ rencana kerja dan anggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan disekolah, kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain), menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat yaitu (menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif), mengawasi layanan pendidikan sekolah yaitu (mengawasi layanan pendidikan disekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan), menindak lanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dan peserta didik, orang tua dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

BAB V, Merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan pra-syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (madrasah), khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.³³

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan bisa meningkat jika manajemen pendidikan dikelola secara benar, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha dua orang atau lebih dan atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan lembaga yang mewadahnya adalah dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite madrasah yang berkedudukan di satuan pendidikan (madrasah). Munculnya kedua lembaga ini didasarkan pada

³³ umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah* (bandung: alfabeta, 2017), 3.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 komite madrasah.³⁴

Komite madrasah sebagai badan penggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usah/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif bagi madrasah memiliki arti pada undang-undang pasal 10-11 nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang berbunyi:

Pasal 10

- a. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberi dukungan tenaga dan sarana prasarana,serta pengawasan pendidikan.
- b. Penggalanagn dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dana/sumbangan, bukan pungutan
- c. Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- d. Hasil penggalanagn dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dengan sekolah
- e. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 1. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan
 2. membiaya program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan
 3. mengembangkan sarana-prasarana
 4. pembiayaan kegiatan oprasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan.
- f. Penggunaan hasil penggalanangan dana oleh sekolah harus:
 1. Mendapat persetujuan dari komite sekolah

³⁴ kepmendiknas sk no.75/u/2016, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, 11.

2. Dipertanggungjawabkan secara transparan
3. Dilaporkan pada komite sekolah

Pasal 11

- a. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan/sumbangan tidak boleh bersumber dari:
 1. Perusahaan rokok atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan warna yang dapat di asosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok.
 2. Perusahaan minuman beralkohol atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan warna yang dapat di asosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol.
- b. Pembiayaan operasional komite sekolah sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
 1. Kebutuhan administrasi/alat tulis kantor
 2. Konsumsi rapat pengurus
 3. Transfortasi dalam rangka melaksanakan tugas
 4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan.³⁵

komite madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah. Melalui komite madrasah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh ekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah.³⁶

Peran komite madrasah sebagai pengawas pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penyelenggara dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian

³⁵ Ibid.

³⁶ sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, 12.

dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya madrasah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki madrasah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di madrasah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.³⁷

Komite madrasah juga berperan sebagai penindak lanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite madrasah untuk disampaikan kepada madrasah. Peran ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua, masyarakat dan peserta didik. Aspirasi yang disalurkan melalui komite madrasah dimanfaatkan oleh madrasah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite madrasah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan di madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite madrasah peran yang harus dijalankan sebagai person ini adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di madrasah.³⁸

Adapun 8 standar nasional pendidikan antara lain sebagai berikut :

1. Standar Isi. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
2. Standar Proses. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
3. Standar Penilaian Pendidikan. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

³⁷ Ibid., 13.

³⁸ kepmendiknas sk no.75/u/2016, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, 11.

4. Standar Kompetensi Lulusan. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
6. Standar Pengelolaan. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
7. Standar Pembiayaan Pendidikan. Berkaitan dengan anggaran sekolah.
8. Standar Sarana dan Prasarana. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

Administrasi sarana dan prasarana ini berkaitan dengan pengelolaan berbagai barang dan juga infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal yang dikelola berkaitan dengan: Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana.³⁹

B. Komite Madrasah

1. Pengertian Komite Madrasah

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang mengacu kepada Dalam "... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 yang menyatakan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan...)16 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 menyatakan masyarakat

³⁹ hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, 100.

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah, juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 192 ayat 2.17 Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau proyek pembangunan yang direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah. Besarnya partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.⁴⁰

Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) merupakan model pengelolaan madrasah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat madrasah untuk mengelola madrasahnyanya sendiri secara langsung. Osorio, menjelaskan bahwa “SBM is the decentralization of authority from the central government to the school level” MBS merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat madrasah yang merupakan pemegang peranan utama dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Di Nigeria terdapat istilah SBMC (school based management committe), Akinola menjelaskan bahwa SBMC adalah sebuah pendekatan untuk reformasi pendidikan yang memungkinkan madrasah secara mandiri untuk membuat keputusan berkaitan dengan keuangan, kurikulum, pengawasan, kebutuhan staf dan isu-isu lain yang

⁴⁰ kepmendiknas sk no.75/u/2016, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah.*

berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. MBS memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengambil berbagai kebijakan operasional madrasah yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder, antara lain guru, siswa, komite madrasah, dan tokoh masyarakat.⁴¹

Komite madrasah atau dewan madrasah adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dari para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan madrasah. Komite madrasah yang ada di luar negeri contohnya di Boston yaitu salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Komite madrasah yang dikenal dengan nama The Boston School Commite. Komite madrasah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari madrasah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komite madrasah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Komite madrasah diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

⁴¹ E. mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi*, 34.

⁴² Ibid., 32.

madrasah, sehingga timbul rasa saling memiliki dan saling bertanggung jawab dalam kemajuan madrasah.

2. Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah

Komite madrasah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, yaitu madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik madrasah negeri maupun swasta. Pada setiap madrasah terdapat satu komite madrasah. Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi, atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk kordinator komite madrasah.⁴³

Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBS).⁴⁴

3. Tujuan Komite Madrasah

Berdasarkan buku pedoman Komite Madrasah tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

⁴³ sirenani, *Komite Sekolah* (Yogyakarta: hikayat phubling, 2008), 24.

⁴⁴ departemen agama RI, *Pedoman Komite Sekolah* (Jakarta: direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2016), 4.

- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁴⁵

4. Peran dan fungsi komite madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.⁴⁶

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite madrasah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite madrasah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan

⁴⁵ Ibid. 4

⁴⁶ hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, 91.

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan oleh komite madrasah adalah sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif
3. Mengawasi pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kerja sekolah

Sementara itu, untuk menjalankan peran komite madrasah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;

- d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.⁴⁷

Komite Madrasah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Komite madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program madrasah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program madrasah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenang, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.⁴⁸

5. Organisasi Madrasah

a. Keanggotaan

Keanggotaan komite madrasah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite madrasah tersebut dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

⁴⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. h. 93-94

⁴⁸ departemen agama RI, *Pedoman Komite Sekolah*, 4.

1. Unsur masyarakat yang berasal dari : orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Madrasah.
3. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;
4. Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah;
5. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah. Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya asal.⁴⁹

b. Kepengurusan

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. yang menangani urusan administrasi Komite Madrasah sebaiknya juga bukan pegawai madrasah.

Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Madrasah.

⁴⁹ eliana sari, *Teori Organisasi Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: jayabaya university, 2006), 3.

2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah.
3. Jika diperlukan pengurus Komite Madrasah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Madrasah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Komite Madrasah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus Komite Madrasah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Madrasah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Madrasah diambil dari anggota Komite Madrasah yang ditetapkan melalui musyawarah.⁵⁰

c. Anggaran Dasar Rumah Tangga

Komite Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Dasar, tujuan dan kegiatan;
3. Keanggotaan dan kepengurusan;
4. Hak dan Kewajiban anggota dan pengurus;
5. Keuangan;
6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;

⁵⁰ Ibid., 4.

7. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

1. Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dan pengurus Komite Madrasah
2. Rincian tugas Komite Madrasah. Mekanisme rapat.
3. Kerjasama dengan pihak lain.
4. Ketentuan penutup.⁵¹

d. Pembentukan komite madrasah

1. Prinsip pembentukan

Pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan perwakilan masyarakat. Madrasah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan

⁵¹ Ibid., 10.

pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

2. Mekanismes

Pembentukan Komite Madrasah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah.

3. Penetapan

Calon anggota Komite Madrasah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara banyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Madrasah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah.

Pengurus dan anggota Komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite madrasah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya, Komite Madrasah untuk SD dan SMP dikukuhkan oleh

Camat dan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota setempat.⁵²

C. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.⁵³

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun intangible. Menurut Jurusan mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.

Atau kini dapat mengacu kepada undang-undang sisdiknas no 19 tahun 2005. Sudarwan mendefinisikan “Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu atau kerja, baik berupa barang maupun jasa”.⁵⁴

Menurut Goetch dan Gavis menjelaskan kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.⁵⁵

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan

⁵² Depertamen Agama RI. Pedoman Komite Sekolah (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2016. h. 16-22

⁵³ departemen agama RI, *Pedoman Komite Sekolah*.

⁵⁴ amirudin, “Reformasi Menejemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pesantran Salaf Di Kabupaten Prigsewu Lampung,” *Al-Idaroh* 5, no. 1 (2015): 4.

⁵⁵ rusman, *Manjemen Kurikuum* (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2019), 554.

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber daya manusia (kepala madrasah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, peerengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.⁵⁶

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat madrasah) proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan pengelolaan kelembagaan pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan input madrasah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan

⁵⁶ Ibid. 555

mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: 1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik dan 2) prestasi non-akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan dan kegiatankegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.⁵⁷

Sudarwan Danim mengatakan bahwa hasil (output) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang di capai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang di peroleh siswa selama mengikuti

⁵⁷ rohiyat, *Teori Dasar Dan Praktik* (bandung: pt refika aditama, 2010), 52.

kegiatan ekstrakurikuler. Disamping itu, mutu keluaran (output) juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh dari anak didik selama menjalani pendidikan.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai.

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka madrasah/ lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain:

1. high moral values;
2. excellent examination results;
3. the support of parents, business and the local community;
4. plentiful resources;
5. the application of the latest technology;
6. strong and purposeful leadership;
7. the care and concern for pupils and students;
8. a well-balanced and challenging curriculum.

Pandangan ini menjelaskan bahwa madrasah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai

imoral/karakter yang tinggi;2)hasil ujian yang sangat baik;3) dukungan orangtua, dunia usaha dan masyarakat setempat;4) sumber daya berlimpah;5) implementasi teknologi terbaru;6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan(visi);7) kepedulian dan perhatian bagisiswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihatdari banyaksisi

Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia parapelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia parapelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak madrasah.

2. Ciri ciri Mutu Pendidikan

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

Transformasi menuju madrasah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan madrasah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi untuk wilayah dan setiap madrasah serta departemen dalam wilayah tersebut.

3. Indikator Mutu Pendidikan

Ada beberapa indikator yang menunjukkan mutu pendidikan itu bermutu, diantaranya yaitu:

1. Secara akademik, lulusan pendidikan tersebut dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Secara moral, lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Secara individual, lulusan pendidikan tersebut semakin meningkatkan ketakwaannya, yaitu manusia yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
4. Secara sosial, lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
5. Secara kultural, ia mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosional), dan psikomotorik (praktis) kultural dapat terbina secara seimbang.⁵⁸

a. Faktor Pendukung

Bahwa untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu adanya dorongan atau dukungan baik dari pemerintah, pihak madrasah dan komite madrasah, yakni:

1. Transparan berarti pembentukan komite madrasah dilakukan secara terbuka. Diketahui oleh masyarakat lingkungan madrasah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat.
2. Akuntabel dalam arti pembentukan komite madrasah yang dilakukan oleh pelaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara fungsional.
3. Demokratis berarti pembentukan komite madrasah dilakukan dengan melibatkan seluruh

⁵⁸ abudi nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kepelmahan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana prenada media, 2001), 172.

masyarakat khususnya masyarakat lingkungan madrasah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.⁵⁹

b. Faktor Penghambat

Lembaga komite madrasah telah ada dan dibentuk di setiap madrasah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite madrasah terutama di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite madrasah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite madrasah masih sangat variatif. Di satu pihak ada komite madrasah yang masih melanjutkan peran dan fungsi BP3 yang sering disebut sebagai stempel kepala madrasah dan adapula komite madrasah yang justru ditakuti oleh kepala madrasah.⁶⁰

Selain itu konsep yang amat elegan ini dalam praktek masih menyisakan penyakit sistem birokrasi yang sentralistik dan feodalistik. Sistem birokrasi “abs” asal bapak senang, birokrasi yang dilayani bukan melayani sistem birokrasi diatas meja bukan dilapangan, atau sistem birokrasi yang berorientasi untuk atasan bukan untuk pelanggan sebagaimana dipaparkan di depan ternyata tidak secara serta-merta dapat berubah meskipun telah diterapkan desentralisasi pendidikan dan dengan adanya otonomi pendidikan.⁶¹

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan peranannya belum optimal, permasalahan termasuk antara lain:

- a. Masalah pemahaman, pemahaman tentang komite madrasah sangat beragam tentang

⁵⁹ *Ibid.*, 174.

⁶⁰ srinenani, *Komite Sekolah*, 84.

⁶¹ *Ibid.*, 85.

peranannya, pembentukannya, keterwakilannya dalam susunan anggota dan yang lebih fatal lagi komite madrasah belum mempunyai AD dan ART komite.

- b. Masalah budaya yang dimaksudkan disini adalah berfikir serta bertindak masyarakat terhadap madrasah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap madrasah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen.
- c. Masalah pembinaan komite madrasah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk madrasah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir komite madrasah belum dapat berfungsi dengan baik.
- d. Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya peran komite madrasah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah.⁶²



⁶² *Ibid.*, 90.

DAFTAR PUSTAKA

- abudi nata. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kepelmahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana prenatal media, 2001.
- amirudin. “Reformasi Menejemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pesantran Salaf Di Kabupaten Prigsewu Lampung.” *Al-Idaroh* 5 (2015).
- arifn imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Keagamaan*. malang: rineka cipta, 1999.
- chairul anwar. *Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kompetorer*. Yogyakarta: ircisod, 2017.
- Chairul Anwar. *Hakikat Manusia, Dalam Dunia Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofi*. Yogyakarta: Suku – Press, 2014.
- departemen agama RI. *Pedoman Komite Sekolah*. Jakarta: direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2016.
- E. mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi*. bandung: pt remaja karya, 2006.
- eliana sari. *Teori Organisasi Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: jayabaya university, 2006.
- hamzah B.uno. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: pt bumi aksara, 2007.
- hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: pt raja grafindo persada, 2006.
- husein sujarweni. *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: pt raja grafindo persada, 1997.
- i gusti mad adi suarnyana, agus sutanto, M. ihsan dacholfany. “Analisis Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Surabaya Lampung Tengah.” *Lentera Pendidikan* 3 (2017).

kependiknas sk no.75/u/2016. *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*. Jakarta: sinar grafika, 2016.

lathifah. "Peran Komite Sekolah Dalam Proses Manajemen Madrasah Tsanawiyah Negeri." *Ilmu Ekonomi Bisnis* 3 (2017).

lexy j. moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: pt remaja rosdakarya, 2007.

mas'ud. "Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidiyah." *Madinatika Manajemen Dan Keguruan* 1 (2020).

Misbah. *Pera Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meingkatkan Mutu Pendidikan*. bandug: alfabeta, 2009.

muhammad isnaini, A. Syarifudin. "Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 1 Palembang." *Jurnal Pai Raden Fattah* 1 (2019).

rambi. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Tadabbur Peradaban Islam* 3 (2021).

rohiyat. *Teori Dasar Dan Praktik*. bandung: pt refika aditama, 2010.

rully indrawan. *Metodelogi Penelitian*. bandung: pt rafika aditama, 2017.

rusman. *Manjemn Kurikulum*. Jakarta: pt raja grafindo persada, 2019.

srirenani. *Komite Sekolah*. Yogyakarta: hikayat phublising, 2008.

sugiono. *Prosedur Penelitian*. bandung: alfabeta, 2006.

suharsimi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: pt rineka cipta, 2002.

sukirno. *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Yogyakarta: pustaka widiyamata, 2006.

Sukmadiata, nana syaodin. *Pegendalian Mutu Sekolah Menengah Konsep, Prinsip, Dan Intrumen*. bandung: refika aditama, 2006.

sumadi suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: pt raja grafindo

persada, 2002.

umaedi. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*. bandung: alfabeta, 2017.

wiratna sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: pt pustaka baru, 2014.



